

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum KPU Kota Malang

1. Gambaran Umum Kota Malang

Letak Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara geografis terletak pada posisi 112,06°–112,07° Bujur Timur, 7.06°–8.02° Lintang Selatan. Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2005 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 23,3°C sampai 24,9°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 30,7°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 71%-85%, dengan kelembaban maksimum 100% dan minimum mencapai 35%. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Nopember dan Desember. Sedangkan pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus curah hujan relatif rendah.

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110.06 Km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kota Malang memiliki potensi obyek pembangunan yang cukup. Potensi ini tentunya masih memerlukan pengelolaan secara optimal dan terintegrasi, sehingga nantinya secara efektif mampu menunjang pembangunan Kota Malang. Adapun batas administrasi Kota Malang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec.Karangploso
Kab. Malang
- Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang
- Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab.Malang
- Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang

Dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 desa/kelurahan, 509 unit RW dan 3783 unit RT (dari hasil Registrasi Penduduk). Adapun pembagian wilayah administrasi, adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 02 RW, 764 RT
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan desa/kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh desa/kelurahan masuk ke dalam kategori desa Swa-Sembada. Artinya hampir seluruh desa/kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (publik).

Penduduk Kota Malang Pada tahun 2014 sebanyak 889.813 jiwa. Dilihat dari penyebarannya, diantaranya 5 kecamatan yang ada memiliki jumlah

penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Lowokwaru yaitu sebesar (169.151 jiwa), kecamatan Sukun yaitu sebesar (202.250 jiwa), Kecamatan Blimbing yaitu sebesar (198.037 jiwa), Kecamatan Klojen yaitu sebesar (118.410 jiwa), Kecamatan Kedungkandang yaitu sebesar (201.950 jiwa).

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Wajib KTP			Jumlah KK
	L	P	Total	L	P	Total	
Belimbing	99,100	98,294	198,037	73,524	73,343	148,867	55,970
Klojen	58,249	60,169	118,418	45,076	47,972	93,048	34,134
Kedungkandang	101,208	100,765	201,973	74,252	75,968	149,789	55,161
Sukun	101,689	100,563	202,252	75,968	76,504	152,472	55,699
Lowokwaru	84,964	84,182	169,146	64,923	65,585	130,508	48,629
TOTAL	445,210	444,603	889,813	333,743	340,941	674,684	249,593

Sumber :BPS Kota Malang

Jumlah penyebaran yang digambarkan pada tabel diatas menggambarkan laju urbanisasi di Kota Malang juga terus berlangsung, sebagai konsekuensi dari kota terbesar ke dua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk di kota-kota sekelilingnya untuk mengadu nasib. Akibatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin meningkat, diluar kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, akibatnya timbulah pemukiman liar yang pada umumnya berkembang di daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api, dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan.

Kota Malang memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 110,06 km², dengan jumlah penduduk yaitu 798.104 jiwa (sensus penduduk juni 2013) dengan kepadatan penduduk ± 7.252 jiwa/km². Kondisi ini akan berimplikasi pada besarnya kegiatan penduduk dan luas persebaran kegiatan pelayanan.

Berikut di bawah ini akan diuraikan dengan tabel kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan serta luas wilayah kecamatan. Adapun persebaran penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2 Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk per Km2
Per-Kecamatan Kota Malang Tahun 2014**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Kedungkandang	39,89	172.663	4.328
2	Sukun	20,97	167.841	8.004
3	Klojen	8,83	106.075	12.013
4	Blimbing	17,77	164.933	9.282
5	Lowokwaru	22,6	186.592	8.256
Jumlah		110,06	798.104	7.252

Sumber : BPS Kota Malang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persebaran jumlah penduduk per kecamatan, adalah sebagai berikut Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Lowokwaru sebanyak 186.592 jiwa (atau 23,4%), dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Klojen (106.075 jiwa atau 13,3%). Untuk kepadatan penduduk dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, maka kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Klojen sebesar 12.013

jiwa/km², Kecamatan Kedungkandang dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 4.328 jiwa/km².

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang beralamat di Jalan Bantaran 6 Malang.

a. Visi, Misi dan Azas KPU Kota Malang

Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalitas, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah

dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan merata, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Azas Penyelenggaraan :

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi dan

1. Efektivitas.

b. Struktur Organisasi KPU Kota Malang

Sebelum memasuki tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah mengambil langkah-langkah persiapan. Ini didasari kesadaran bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2014 merupakan pesta demokrasi seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya dan warga Kota Malang pada khususnya dalam memilih langsung calon legislatif. Untuk itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar tercapai kesuksesan dalam pelaksanaannya. Secara garis besar Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempersiapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan memperkuat sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan.
2. Menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti melakukan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, diantaranya dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kota Malang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, aparat keamanan, dan instansi akademik.






4. Menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar teknis petunjuk pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2014.

Empat hal tersebut diatas harus bisa dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam rentang masa tahapan pemilu tahun 2014.

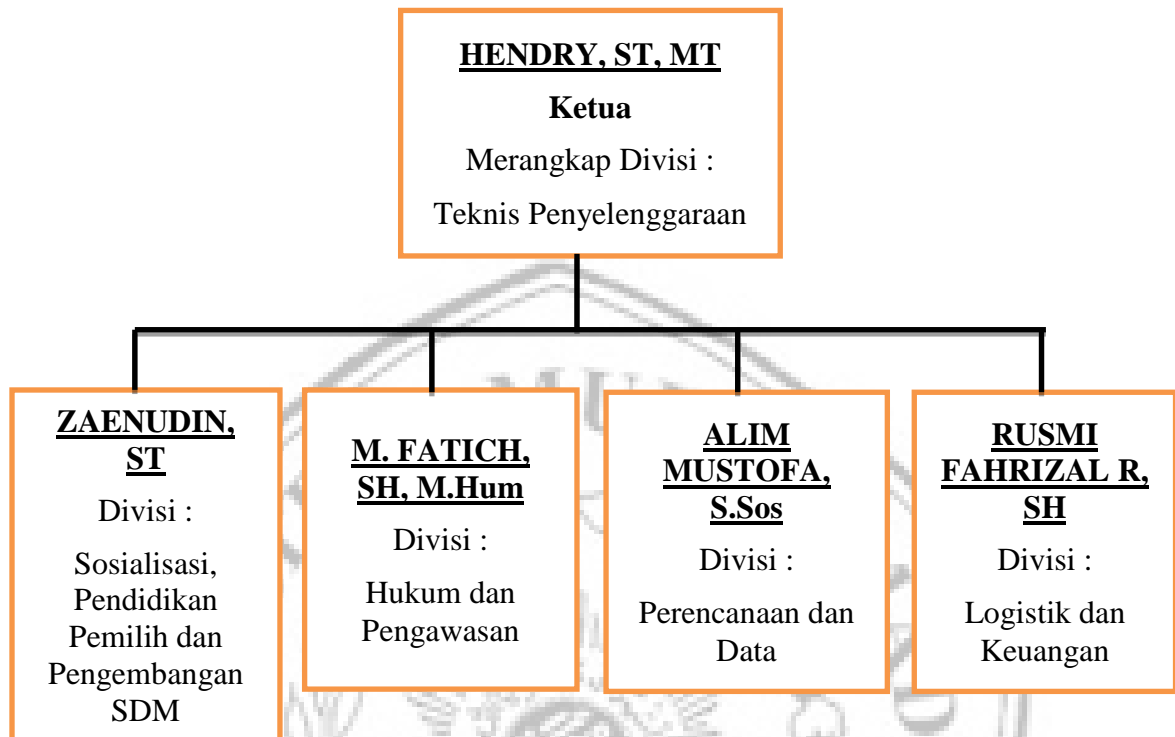
a. Komisioner KPU Kota Malang

Komposisi keanggotaan untuk Komisi Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan adalah, 7 komisioner untuk KPU Pusat, 5 komisioner untuk KPU Provinsi dan 5 komisioner untuk KPU Kabupaten/Kota, dan masing-masing komisioner diketuai oleh satu orang ketua. KPU yang bersifat tetap memiliki masa bakti 5 tahun terhitung sejak dilantik, dalam perjalanannya fase pergantian personil berada dalam masa tahapan pemilu, sehingga praktis untuk pemilu legislatif tahun 2014 sebagian besar yang melaksanakan adalah KPU periode 2009-2014 dan selebihnya diselesaikan oleh KPU periode 2014-2019.

Tabel 3.3 Komisioner KPU Kota Malang periode 2009-2014

NAMA	KETERANGAN
	<p>Nama : HENDRY, ST, MT</p> <p>Jabatan : KETUA</p> <p>Divisi : Teknis Penyelenggaraan</p>
	<p>Nama : ZAENUDIN, ST</p> <p>Jabatan : ANGGOTA</p> <p>Divisi : Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM</p>
	<p>Nama : ALIM MUSTOFA, S.Sos</p> <p>Jabatan : ANGGOTA</p> <p>Divisi : Data dan Hubungan antar lembaga</p>
	<p>Nama : MOCH. FATICH, SH., M.Hum</p> <p>Jabatan : ANGGOTA</p> <p>Divisi : Hukum, Kampanye, dan Pengawasan</p>
	<p>Nama : RUSMI FAHRIZAL RUSTAM, SH</p> <p>Jabatan : ANGGOTA</p> <p>Divisi : Logistik dan Keuangan</p>

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang periode 2009 – 2014 yaitu :

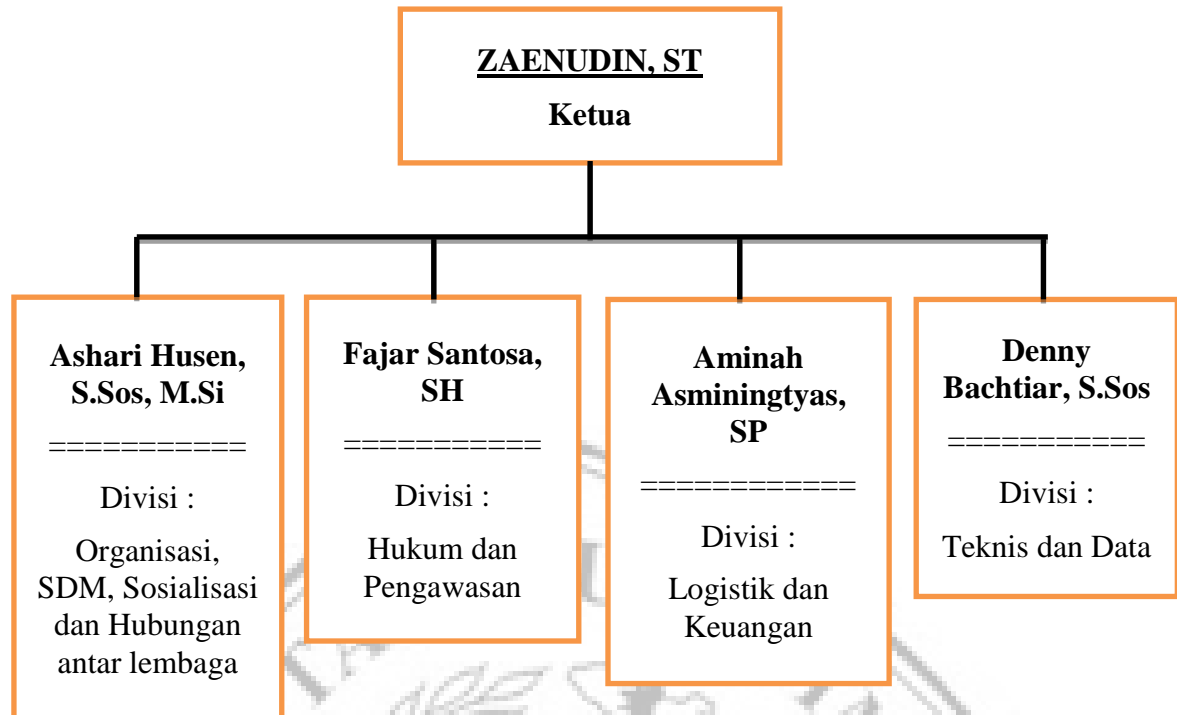


Pada tanggal 12 Juni 2014 terjadi pergantian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dikarenakan telah berakhirnya untuk periode masa jabatan 2009 – 2014, digantikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Malang periode 2014 – 2019. Pergantian diatas tepat berada pada tahapan akhir pemilu Legislatif dan sudah memasuki tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Berikut komposisi KPU Kota Malang dan pembagian divisi :

- a. **ZAENUDIN, ST.** sebagai Ketua
- b. **ASHARI HUSEN, S.Sos, M.Si.** sebagai anggota yang menjabat Divisi Organsasi, SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Antar Lembaga.
- c. **FAJAR SANTOSA, SH.** sebagai anggota yang menjabat Divisi Hukum, dan Pengawasan.
- d. **DENNI BACHTIAR, S. Sos.** sebagai anggota yang menjabat Divisi Teknis dan Data.
- e. **AMINAH ASMININGTYAS, SP.,** sebagai anggota yang menjabat Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik.

Pergantian diatas tepat berada pada tahapan akhir pemilu Legislatif dan sudah memasuki tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang periode 2014 – 2019 yaitu :



Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan untuk selanjutnya disebut KPU Kota Malang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu :

- (1) Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Malang.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Malang berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Malang, dan KPU Provinsi.

- j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Malang untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan mengumumkannya.
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Malang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Malang.
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Malang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Malang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Malang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- * n. Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Malang kepada masyarakat.
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Malang dan lembaga kearsipan Kota Malang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Malang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kota Malang

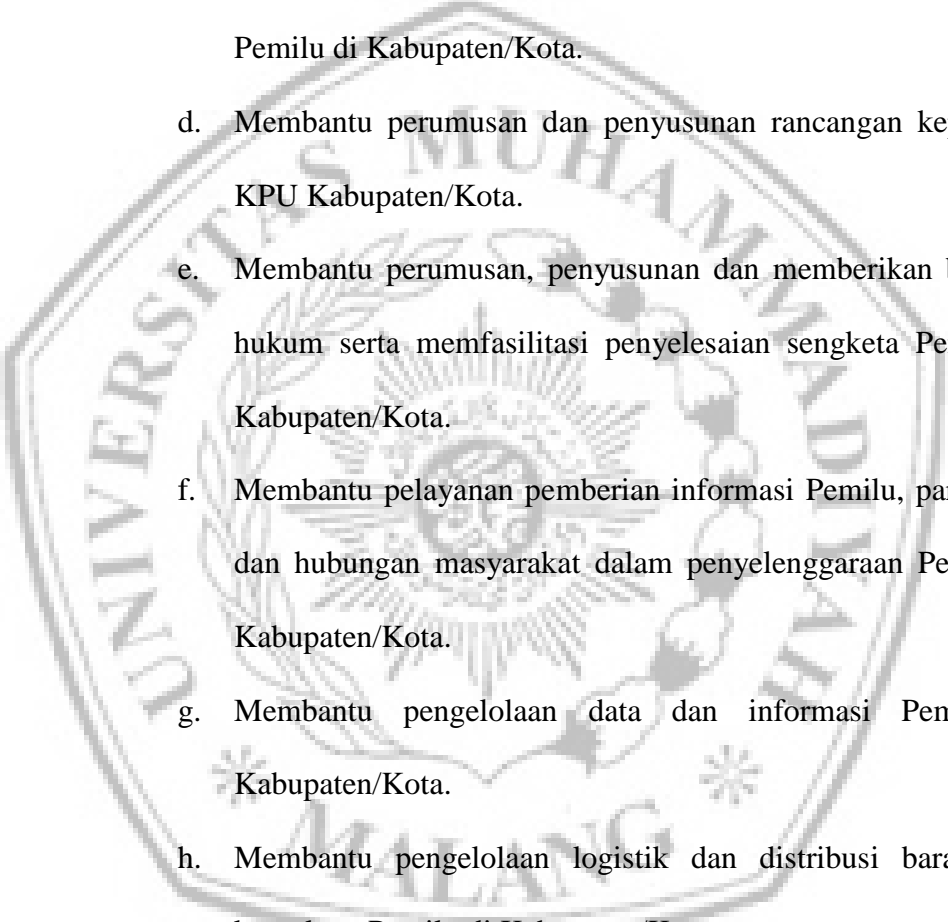
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Secara umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kota berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008 menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
 - j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

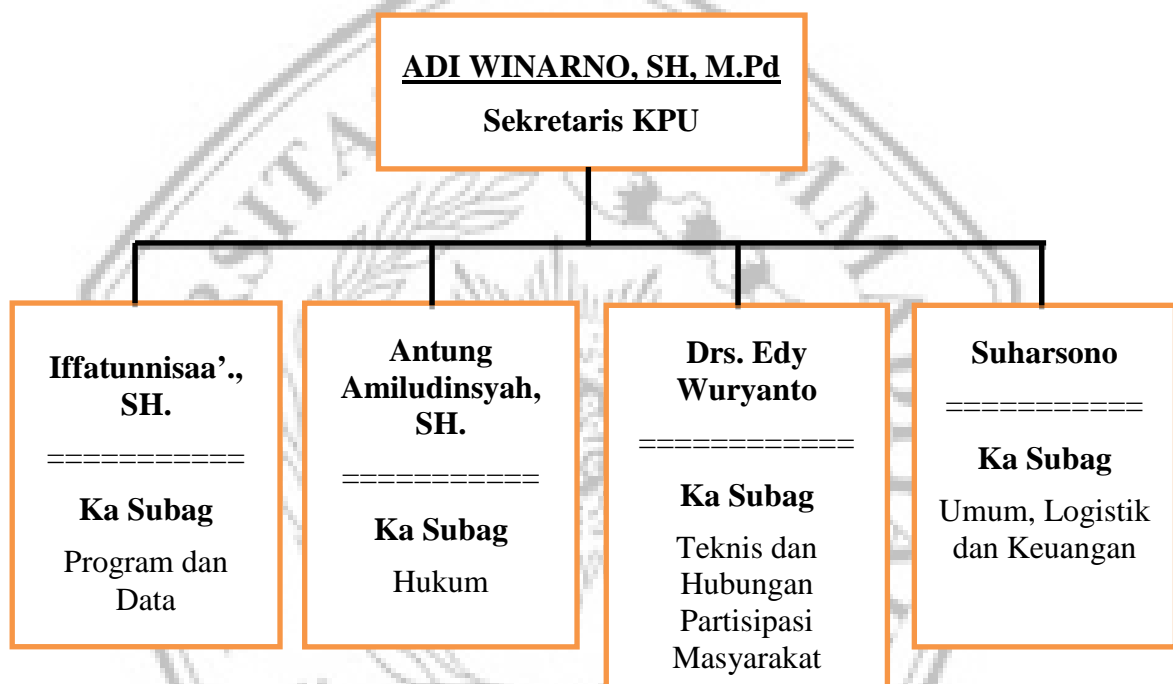
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibagi menjadi 4 (empat) sub bagian dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretaris yang dijabat oleh **Adi Winarno, SH., M. Pd.**
- b. Subbag Program& Data yang dijabat oleh **Iffatunnisaa', SH.**
- c. Subbag Hukum yang dijabat oleh **Antung Amiludinsyah, SH.**

d. Subbag Teknis yang dijabat oleh **Drs. Edy Wuryanto**.

e. Subbag Umum dan Keuangan yang dijabat oleh **Suharsono**.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seluruh staff KPU Kota Malang bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Malang sebagai atasan langsung. Berikut struktur organisasi kesekretariatan :



Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU, yang dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Malang dan Sekjen KPU RI.